



WALIKOTA BEKASI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 39 TAHUN 2006

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10,11,12,13 dan pasal 14 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta hasil perubahan dan penyempurnaan rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural yang dilaksanakan oleh tim penyusun rancangan perubahan tupoksi dan formasi SKPD pemerintah kota Bekasi, perlu mengubah keputusan walikota Bekasi nomor 22 tahun 2004 tentang tugas pokok dan fungsi dinas pengelolaan lingkungan hidup pemerintah kota Bekasi, yang ditetapkan dengan peraturan walikota.

Mengingat :

1. undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (lembaran negara tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran negara nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 (lembaran negara tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran negara nomor 3890);
2. undang-undang nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Bekasi (lembaran negara tahun 1996 nomor 111, tambahan lembaran negara nomor 3663);
3. undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (lembaran negara tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran negara nomor 3699);
4. undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa (lembaran negara tahun 1999 nomor 138, tambahan lembaran negara nomor 3872);

5. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125,tambahan lembaran negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemeerintah daerah menjadi undang-undang (lembaran negara tahun 2005 nomor 108,tambahan lembaran negara nomor 4548);
6. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan (lembaran negara tahun 1999 nomor 59,tambahan lembaran negara nomor 3838);
7. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (lembaran negara tahun 1999 nomor 190,tambahan lembaran negara nomor 3910);
8. peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (lembaran negara tahun 2000 nomor 54,tambahan lembaran negara nomor 3952)
9. peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan diluar pencedaliam (lembaga negara tahun 2000 nomor 113,tambahan lembaran negara nomor 3982);
- 10.peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (lembaran negara tahun 2001 nomor 138,tambahan lembaran negara nomor 4153);
- 11.peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (lembaran negara tahun 2000 nomor 113,tambahan lembaran negara nomor 3982);
- 12.peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah (lembaran negara tahun 2003 nomor 14,tambahan lembaran negara nomor 4262);
- 13.peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran negara tahun 2005 nomor 140,tambahan lembaran negara nomor 4578);
- 14.peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah (lembaran negara tahun 2006 nomor 25,tambahan lembaran negara nomor 4614);
- 15.peraturan daerah kota Bekasi nomor 30 tahun 2003 tentang pembentukan dinas pengelolaan lingkungan hidup pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah nomor 30 seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kota Bekasi.
5. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup pemerintah kota Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas pengelolaan lingkungan hidup pemerintah kota Bekasi.
7. Bagian Tata Usaha,Bidang,Sub Bagian dan Seksi adalah Bagian Tata Usaha,Bidang,Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup pemerintah kota Bekasi.
8. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bekasi.
9. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPK adalah kepala badan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
12. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
14. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
15. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia),barang,modal termasuk peralatan dan teknologi,dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
17. Unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis operasional dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu sesuai penetapan tugas pokoknya.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas yang menjadi kewenangan dinas pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

ORGANISASI DINAS

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi Dinas

Pasal 2

Unsur organisasi dinas terdiri atas :

1. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
2. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian;
3. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPTD dan kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pimpinan dan Pembantu Pimpinan

Paragraph 1

Unsur Pimpinan

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kewenangan dinas dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi urusan analisis mengenai dampak lingkungan, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam dan energy, serta pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepala dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
 - b. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Tata Usaha, Bidang-Bidang, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Pembinaan administrasi perkantoran;
 - d. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
 - e. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang pengelolaan lingkungan hidup serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas;
 - g. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;
 - h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh walikota;
 - i. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dinas kepada PPKD sesuai ketentuan yang berlaku;

- j. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas dinas kepada walikota melalui sekretaris daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraph 2

Unsur Pembantu Pimpinan

Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan perencanaan program.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bagian tata usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bagian tata usaha sesuai visi dan misi dinas;
 - b. Pengkoordinasian penyiapan bahan program dan rencana kerja bidang;
 - c. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup dinas;
 - d. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian dinas;
 - e. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang investaris dinas;
 - f. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
 - g. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan UPTD;
 - h. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas;
 - j. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan bagian tata usaha dan kegiatan dinas secara berkala.
- (3) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu bagian tata usaha melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan administrasi pegawai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sub bagian umum mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan sub bagian umum;
 - b. Pelaksanaan pelayanan tata usaha;
 - c. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan dinas;
 - d. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris dinas;
 - e. Pengelolaan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai dinas;
 - f. Pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran dinas;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu bagian tata usaha melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan serta pengelolaan akuntansi keuangan dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sub bagian perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan sub bagian perencanaan;
 - b. Penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
 - c. Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas;
 - d. Penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas selaku PPK-SKPD dinas;
 - f. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksana Dinas

Paragraph 1

Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pasal 7

- (1) Bidang AMDAL mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas melaksanakan urusan bidang yang meliputi penelitian dampak lingkungan dan bina sadar lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bidang AMDAL mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bidang;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang AMDAL;
 - c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja sama penyelenggaraan tugas dengan SKPD terkait;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas;
 - g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
- (3) Bidang AMDAL, membawahkan :
 - a. Seksi Penelitian Dampak Lingkungan; dan
 - b. Seksi Bina Sadar Lingkungan.

Pasal 8

- (1) Seksi Penelitian Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan penelitian dampak lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,seksi penelitian dampak lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;

- b. Pelaksanaan petunjuk teknis penelitian dampak lingkungan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Pasal 9

- (1) Seksi Bina Sadar Lingkungan mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan bina sadar lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,seksi bina sadar lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
 - b. Pelaksanaan petunjuk teknis bina sadar lingkungan;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Paragraph 2

Bidang Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Energi

Pasal 10

- (1) Bidang Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Energi mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas melaksanakan urusan bidang yang meliputi pengelolaan sumber daya alam dan konservasi sumber daya alam dan energi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bidang pengelolaan dan konservasi sumber daya alam dan energy mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bidang;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang pengelolaan dan konservasi sumber daya alam dan energi;
 - c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja sama penyelenggaraan tugas dengan SKPD terkait;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas;
 - g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
- (3) Bidang pengelolaan dan konservasi sumber daya alam dan energi, membawahkan :
 - a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam; dan
 - b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pengelolaan sumber daya alam.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,seksi pengelolaan sumber daya alam mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;

- b. Pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan sumber daya alam;
- c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Pasal 12

- (1) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan konservasi sumber daya alam.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,seksi konservasi sumber daya alam mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
 - b. Pelaksanaan petunjuk teknis konservasi sumber daya alam;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Paragraph 3

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 13

- (1) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas melaksanakan urusan bidang yang meliputi pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta penanggulangan dan pemulihan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,bidang pengendalian dampak lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bidang;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang pengendalian dampak lingkungan;
 - c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja sama penyelenggaraan tugas dengan SKPD terkait;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas;
 - g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
- (3) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
 - b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,seksi pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
- b. Pelaksanaan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Pasal 15

- (1) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan penanggulangan dan pemulihan lingkungan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, seksi penanggulangan dan pemulihan lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
 - b. Pelaksanaan petunjuk teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang tugasnya;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

Paragraph 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan ditetapkan dengan keputusan wallikota.
- (4) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 18

Bagan struktur organisasi dinas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Peraturan lebih lanjut tentang uraian tugas jabatan akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.
- (2) Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan peraturan atau keputusan kepala dinas.

Pasal 20

Dengan berlakunya peraturan ini, maka keputusan walikota Bekasi nomor 22 tahun 2004 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup pemerintah kota Bekasi dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau dibawahnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 29 Desember 2006

WALIKOTA BEKASI

TTD/CAP

AKHMAD ZURFAIH